

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, kinerja aparatur pemerintah desa sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dipertegas dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa itu adalah kepala desa atau perangkat desa yang dimana ketika menjalankan pertanggungjawabannya, memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari adanya kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, tanggungjawab dari pemerintah desa bukan lagi hanya menekankan pada proses membuat, melaksanakan, dan mewujudkan program ekonomi saja, tetapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketepatan penyampaian laporan, maupun kegiatan lainnya juga harus diperhatikan. Sari, Ananda Permata (2022)

Kinerja merupakan keluaran ataupun hasil dari suatu kegiatan atau proram yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1). Ukuran kinerja dapat berikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi satu ukuran untuk mngadakan perbaikan pada masa mendatang. Sedangkan keberhasilan atas kinerja memerlukan suatu penghargaan untuk dapat menambah produktivitas serta untuk memperoleh dukungan publik terhadap pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan supaya meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan pengawasan.

Fenomena akuntabilitas ialah pertanggungjawaban untuk aparat pemerintah masi belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya sebab instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup serta penggunaannya. Secara teori, akuntabilitas mencakup tiga alat utama, yaitu : dapat diverifikasi (*verifiability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kemampuan menjawab (*answerability*). Terdapat instrumen akuntabilitas yang mencakup proses akuntabilitas internal dan akuntabilitas secara eksternal. Selain itu, konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan pada prosedural, legal, dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*selected official*). Kurang penekanan pada akuntabilitas publik ataupun masyarakat luas.

Selain menerapkan prinsip dari akuntabilitas serta transparasi juga harus menerapkan pengawasan. Pengawasan adalah proses menerapkan kriteria kinerja dan melakukan tindakan yang membantu mencapai hasil yang diharapkan yang sesuai dengan kinerja yang telah diberikan. Pengawasan diperlukan guna membentuk pimpinan pemerintah untuk melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keadaan sistem pengendalian intern termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan di daerah.

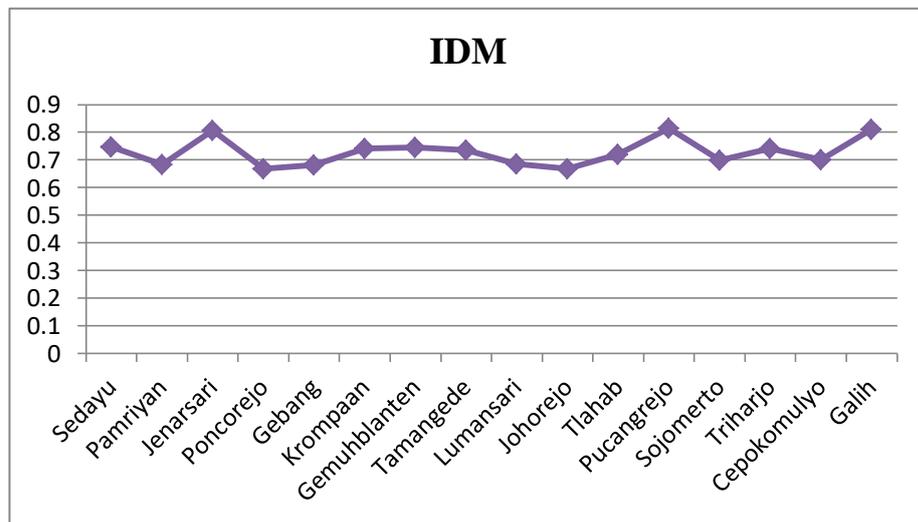
Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian ke tahap berikutnya. Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik jika siklus

pengelolaan keuangan Desa pun berjalan dengan baik. Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggaraan keuangan Desa diselesaikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Ningsih dan Kartadjuma (2021).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menentukan jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014). Adanya klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020).

Desa Sedayu, Pamriyan, Jenarsari, Poncorejo, Gebang, Krompaan, Gemuhblanten, Tamangede, Lumansari, Johorejo, Tlahab, Pucangrejo, Sojomerto, Triharjo, Cepokomulyo, Galih yang semuanya berada di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal memiliki Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2022 di angka indeks sebagai berikut.

**Gambar 1.1** IDM Kecamatan Gemuh



Sumber : data.kendalkab.go.id

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja Pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi output dari pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang menyatakan bahwa data IDM dapat digunakan untuk melakukan evaluasi perkembangan desa. (Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun).

Berdasarkan data tersebut diatas, mengindikasikan keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang didasari oleh IDM pada desa di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal masih perlu diperhatikan pelaksanaan pengelolaannya. Tercermin dari situs <https://www.kendalkab.go.id> enam belas desa yang berada di Kecamatan Gemuh hanya ada tiga desa (Desa Jenarsari, Desa Pucangrejo, dan Desa Galih) yang mengunggah informasi laporan keuangan desanya. Bahkan dari hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa situs-situs tersebut jarang diupdate. Hal ini terlihat dari postingan terakhir di situs-situs tersebut banyak dilakukan pada tahun 2019 dan templete situs sebagian besar masih relatif kosong hanya terdapat halaman beranda yang memuat kurang dari sepuluh berita.

Padahal, informasi laporan keuangan yang mudah diakses secara publik dapat dijadikan kontrol dalam peran pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan pengendalian terhadap kebijakan dana desa. Selain itu, informasi laporan keuangan desa yang mudah diakses dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa atas segala aktivitas finansial yang akuntabel sehingga aparatur desa yang akuntabel dalam kinerjanya akan merepresentasikan kompetensi aparatur desa yang unggul.

Selain teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam beberapa studi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian Penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan (secara stimulan dan parsial) mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sari, Ananda Dewi Permata (2022) menjelaskan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian terdahulu Ningsih dan Kartadjuma (2021) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan Desa cadangan. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah sesuatu yang vital dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menangani Dana Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Suci dan Rohmah (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari, Ananda Dewi Permata (2022) mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pertama, lokasi penelitian, penelitian sebelumnya pada desa se-kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan penelitian ini pada desa se-kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Batasan pada penelitian ini yang akan dibahas yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Konteks yang diuraikan diatas memungkinkan untuk dirumuskan berbagai masalah yang akan menjadi bahan kajian, antara lain : pertama apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh. Kedua apakah transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh. Ketiga apakah pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain : pada aspek Akademis (Teoritis) yaitu bagi pengembangan ilmu akademisdiharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja. Bagi peneliti dapat meningkatkan wawasan yang luas tentang kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh terutama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Serta pada aspek Praktis (Operasional) yaitu bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Stewardship**

Menurut teori *stewardship*, *steward* harus lebih menaruh perhatiannya untuk memajukan organisasi daripada tujuan atau kepentingan pribadinya sendiri. Menurut pengertian ini, pemerintah desa berfungsi sebagai *steward* dan tidak dimotivasi oleh keuntungan pribadi karena lebih terfokus pada melayani kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai. *Steward* akan tetap menjunjung tinggi prinsip kesatuan meskipun terjadi konflik antara kepentingan *steward* dan prinsipal. Ayem dan Fitriyaningsih (2022)

Asumsi dari teori ini adalah untuk memperjelas fungsi pemerintah desa sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahun kalender pengelolaan keuangan desa berlangsung dari tanggal 1 Januari - 31 Desember sejalan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan dikatakan berkualitas apabila pengelolaan keuangan didasarkan dengan asas-asas pengelolaan keuangan

desa, yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yakni adanya keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- b. Akuntabel, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa.
- c. Partisipatif, yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.
- d. Tertib Dan Disiplin Anggaran, yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan

### **2.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau suatu bentuk dimana keharusan bagi seseorang (pimpinan, pejabat, pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas serta kewajiban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah akuntabilitas memiliki hubungan kaitan yang erat demi tercapainya suatu kinerja organisasi pemerintah yang baik. Pada dasarnya, akuntabilitas juga diterapkan guna menilai keberhasilan maupun kegagalan pemerintah ketika melaksanakan tugas ataupun wewenangnya. Dan berhasil atau tidaknya pemerintah ketika menjalankan tugas maupun tanggungjawab, dapat dilihat pada laporan kerjanya. Sari, Ananda Dewi Permata (2022)

### **2.4 Transparansi**

Transparansi disuatu pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberi informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Purnama dan Nadirsyah (2016)

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 menerangkan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk secara terbuka dan sepenuhnya mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi dalam aktivitas urusan publik salah satunya di bidang administrasi keuangan dapat memudahkan pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat

mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemerintahan. Transparansi dapat mendorong kinerja karyawan pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam mengambil kebijakan pemerintah dan melaksanakan kegiatan- kegiatan pemerintah.

## **2.5 Pengawasan**

Pengawasan adalah proses mengidentifikasi ukuran dari kinerja juga mengambil tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau dapat juga dipahami sebagai proses dari kegiatan yang dilakukan secara berkepanjangan untuk memahami, mengamati, serta menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sari, Ananda Dewi Permata (2022)

## **2.6 Kinerja Pemerintah Desa**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kinerja pemerintah desa merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah desa memerlukan sistem pengelolaan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan semakin kecil serta adanya kejelasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.

## **2.7 Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa

ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : < 0,491, Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599, Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707, Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815, Desa Mandiri : > 0,815.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu Pumama dan Nadirsyah (2016) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan (secara stimulan dan parsial) mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sari, Ananda Dewi Permata (2022) menjelaskan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian terdahulu Ningsih dan Kartadumena (2021) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan Desa cadangan. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah sesuatu yang vital dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menangani Dana Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Suci dan Rohman (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan.

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Desa Kecamatan Gemuh**

Sebuah akuntabilitas memiliki hubungan kaitan yang erat demi tercapainya suatu kinerja organisasi pemerintah yang baik. Pada dasarnya, akuntabilitas juga diterapkan guna menilai keberhasilan maupun kegagalan pemerintah ketika melaksanakan tugas ataupun wewenangnya. Dan berhasil atau tidaknya pemerintah ketika menjalankan tugas maupun tanggungjawab, dapat dilihat pada laporan kerjanya. Sari, Ananda Dewi Permata (2022)

Konsisten dengan teori *stewardship* yang menjadi landasan teori dimana adanya akuntabilitas yang kuat dapat meningkatkan capaian kinerja, pemerintah desa selaku *steward* harus mampu mempertanggungjawabkan kegiatan berupa mengungkapkan segala informasi baik keberhasilan atau kegagalan kepada masyarakat atau principal terkait putusan program kegiatan yang dijalankan dengan akurat sehingga mewujudkan kinerja anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif. Suci dan Rohmah (2021)

H<sub>1</sub> : Diduga terdapat pengaruh positif akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh

### **2.7.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan untuk mengakses bagi masyarakat guna mendapatkan informasi pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan dalam mengelola sumber daya. Transparansi dinilai dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat

mencapai tiga segi pemerintah, dan diberlakukannya prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif. Purnama dan Nadirsyah, (2016)

Seperti halnya dengan akuntabilitas, transparansi juga memiliki hubungan erat dengan kinerja yang tanpa adanya keterbukaan, kinerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Transparansi merupakan salah satu faktor pendukung terpenting dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Transparansi diterapkan bukan semata-mata untuk memberikan akses informasi terkait kinerja pemerintah saja, tetapi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan juga harus diperhatikan. Sari, Ananda Dewi Permata (2022)

H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh positif transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh.

### **2.7.3 Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh**

Pengawasan merupakan suatu proses dari kegiatan yang dilakukan secara berkepanjangan untuk memahami, mengamati, serta menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sari, Ananda Dewi Permata (2022). Pengawasan berubungan dengan kinerja pemerintah daerah. Untuk berhasil mencapai visi dan misi tersebut diperlukan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dari segi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kinerja pemerintah.

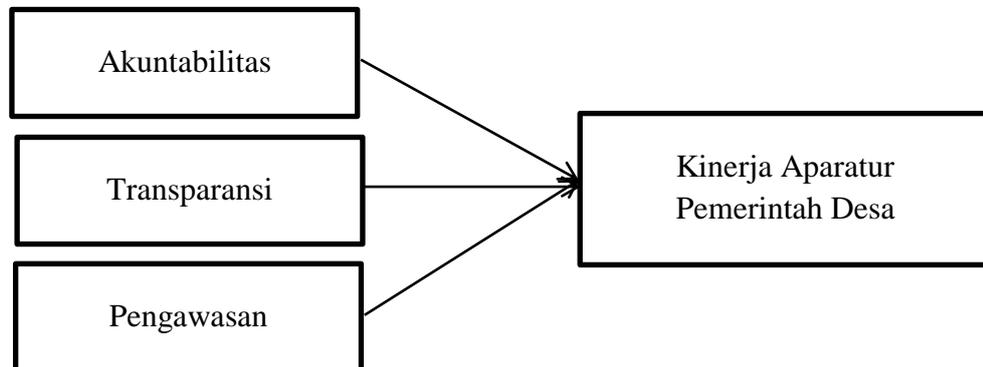
Dengan adanya pengawasan, organisasi perangkat daerah (*steward*) akan mengelola anggaran dengan optimal sesuai dengan visi dan misi guna menyediakan layanan yang efektif bagi masyarakat serta membantu dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*principal*). Teori *stewardship* memperkuat adanya pengawasan karena perilaku kooperatif oleh OPD (*steward*) akan mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dalam hal ini, teori *stewardship* mendeskripsikan orang yang secara inheren mampu bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan kejujuran yang tinggi. Menurut teori regulasi, pelaksanaan pengawasan yang efektif dapat membantu OPD untuk menjalankan pengelolaan sesuai peraturan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah karena dengan adanya pengawasan, pemerintah akan beroperasi dengan lebih baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Suci dan Rohmah (2021)

H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh positif pengawasan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Gemuh.

## 2.10 Model Penelitian

Hubungan antara Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dapat dilihat pada model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.2** Model Penelitian



## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebagai gaya penulisannya. Dengan menggunakan *instrument* penelitian yang dibuat khusus dan fokus pada analisis numerik dan statistik untuk menguji hipotesis sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penulisan yang nilai satu atau lebih variabel (independen) ditentukan secara independen dari faktor lain merupakan salah satu pengertian dari penulisan deskriptif (Sugiyono, 2016).

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti gunakan untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintahan desa di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Desa Sedayu, Pamriyan, Jenarsari, Poncorejo, Gebang, Krompaan, Gemuhblanten, Tamangede, Lumansari, Johorejo, Tlahab, Pucangrejo, Sojomerto, Triharjo, Cepokomulyo, Galih adalah desa-desa di Kecamatan Gemuh.

#### 3.2.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) menjelaskan bahwa sampel mewakili populasi secara keseluruhan, termasuk ukuran dan susunannya. Estimasi keterwakilan sampel berkisar antara 30 sampai 500 (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel yang disebut *Purposive Sampling* yang memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan sampel.

Kriteria diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan yang memiliki masa tugas lebih dari 1 tahun dan terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ini berjumlah 64 responden.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah semua hal yang penulis pilih untuk diteliti agar memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik untuk membuat kesimpulan tentangnya (Sugiyono, 2016). Penulisan variabel dapat diklasifikasikan sebagai dependen (variabel dependen) atau independen (variabel independen). Faktor-faktor berikut diperhitungkan saat menulis ini :

#### a. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sebuah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain dan yang nilainya dapat bervariasi dikenal sebagai variabel dependen. Variabel respons, diwakili oleh huruf Y, adalah nama lain dari variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

**Table 3.1** Operasional Variabel Dependen (Y)  
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
<b>Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Y)</b>	Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas.	Perencanaan	Likert	4
		Pelaksanaan		5
		Penatausahaan		3
		Pelaporan dan Pertanggungjawaban		4

#### b. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen (*independent variable*) atau variable bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variable dependen (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penulisan ini yaitu : Akuntabilitas (X1), Kompetensi Aparatur (X2), dan Aksesibilitas (X3)

**Table 3.2** Operasional Variabel Independen (X1)  
Akuntabilitas

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
<b>Akuntabilitas (X1)</b>	Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan <i>disclosure</i> atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut	Akuntabilitas kejujuran dan hukum	Likert	3
		Akuntabilitas Proses		3
		Akuntabilitas Program		3
		Akuntabilitas Kebijakan		2

**Table 3.3** Operasional Variabel Independen (X2)  
Transparansi

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Transparansi (X2)	Transparansi disuatu pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, karena merupakan salah satu prinsip good governance	Memberikan informasi	Likert	3
		Dokumen-dokumen yang dipublikasikan		2

**Table 3.4** Operasional Variabel Independen (X3)  
Pengawasan

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala	Item
Pengawasan (X3)	Pengawasan adalah proses mengidentifikasi ukuran dari kinerja juga mengambil tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan	Peningkatan disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas	Likert	1
		Berkurangnya penyalahgunaan wewenang		1
		Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar		1

### 3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner menjadi sumber data penulisan. Untuk mengumpulkan data, disediakan pertanyaan atau pernyataan tertulis.

Hasil studi sebelumnya yang telah diuji digunakan untuk membuat kuesioner. Dengan menggunakan *skala Likert*, variabel dalam penulisan ini diukur, dan responden diminta untuk bereaksi sesuai dengan pendapatnya. Responden harus memilih satu dari lima kemungkinan tanggapan untuk setiap pernyataan ini, dan setiap tanggapan dinilai sebagai berikut :

**Table 3.5** Skor Kuesioner Berdasarkan Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1.	Sangat setuju/Sangat positif	5
2.	Setuju/Positif	4
3.	Kurang setuju/Kurang positif	3
4.	Tidak setuju/Tidak positif	2
5.	Sangat Tidak setuju/Sangat Tidak positif	1

Kuesioner dibagikan kepada sembilan kantor pemerintahan desa di Kecamatan Gemuh dalam bentuk hard file. Sebelum membagikannya, peneliti memastikan kembali bahwa kuesioner yang dibuat dapat dipahami tidak ambigu agar responden mudah mengerti dalam menjawabnya.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) mengklaim bahwa metodologi penelitian yang berlandaskan positivisme memenuhi syarat sebagai metode ilmiah karena menjunjung tinggi cita-cita ilmu pengetahuan secara empiris, objektif, dapat diverifikasi, logis, dan metodis. Pendekatan kuantitatif memanfaatkan peralatan penulisan untuk mengumpulkan data, mengevaluasi data kuantitatif atau statistik, dan menguji hipotesis yang disiapkan yang digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu. Alat analisis yang digunakan adalah *Statistical Package For Social Sciences Vers 26 (SPSS 26)*.

#### **3.5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Hal ini dimaksudkan agar dengan mengadopsi alat yang dapat dipercaya, temuan penulisan juga dapat dipercaya. Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam pengujian instrumen penelitian ini. Kedua percobaan ini dilakukan untuk melihat apakah instrumen penulisan dapat digunakan dengan sukses. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian utama mereka.

##### **a. Uji Validitas Instrumen**

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kuesioner untuk penulisan digunakan uji validitas. Setiap klaim atau kuesioner diuji menggunakan rhitung dan tabel, asalkan  $df = n - 2$  dan tingkat signifikansi kurang dari 5% terpenuhi. Dikatakan sah jika  $R_{tabel} > R_{hitung}$  (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019).

##### **b. Uji Reliabilitas Instrumen**

Uji validitas menilai reliabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bergaya kuesioner yang bersangkutan. Pada setiap soal, uji reliabilitas dapat dijalankan secara bersamaan. Dapat dipercaya jika nilai Alpha lebih besar dari 0,7. (Ghozali I, 2021).

#### **3.5.2 Rancangan Analisis Deskriptif**

Strategi penelitian yang dikenal sebagai analisis deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan dan menganalisis item dalam hal apa adanya. Membuat korelasi antar variabel, menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan membuat teori dengan penerapan yang luas semuanya dapat dicapai dengan menggunakan analisis deskriptif.

Menggunakan program aplikasi SPSS sebagai alat bantu akan membantu dalam prosedur analisis data. Nilai terendah, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel akan diketahui menurut data hasil olahan SPSS yang meliputi akuntabilitas, kapabilitas perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan standar deviasi masing-masing variabel.

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS (Ordinary Least Square) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Model regresi yang baik tidak mengandung asumsi klasik. Berikut ini yaitu premis standar untuk regresi linier berganda :

#### **a. Uji Normalitas**

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik (statistik inferensial), maka dilakukan uji normalitas. Dengan kata lain, uji normalitas menentukan apakah data yang dikumpulkan di lapangan mengikuti distribusi teoretis tertentu. Normalitas model regresi diperiksa dalam karya ini menggunakan uji sampel Kolmogorov-Smirnov (Ghozali I, 2021). Normalitas distribusi kumpulan data dapat ditentukan lebih cepat dengan uji Kolmogorov-Smirnov berkat penentuan nilai signifikan lebih dari 0.05.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Meskipun ada beberapa (jika ada) variabel independen yang signifikan, ada beberapa metode untuk mendeteksi multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antara variabel independen, termasuk nilai  $R^2$  yang tinggi. Jika ada korelasi lebih dari 0,80 antara variabel independen, multikolinieritas bisa menjadi masalah serius. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, sering digunakan nilai threshold, tolerance 0,10 atau sebanding dengan nilai variance inflation factor (VIF)  $> 10$ . (Ghozali I, 2021).

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode uji statistik (uji formal). Metode grafik relatif lebih mudah untuk dilakukan namun memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi tampilannya. Uji statistik dapat diinterpretasikan yaitu jika signifikan hasil korelasi rank spearman mengkorelasi antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas lebih kecil dari 0.05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas (Sugiyono, 2016).

### **3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Ketika hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen disediakan oleh regresi linier dasar, regresi linier berganda merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Kekuatan atau derajat hubungan antara faktor independen dan variabel dependen dinilai dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk keperluan penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk memastikan dampak akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Bentuk

persamaan regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2016) yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa  
X<sub>1</sub> = Akuntabilitas  
X<sub>2</sub> = Kompetensi Aparatur  
X<sub>3</sub> = Aksesibilitas Laporan Keuangan  
a = Konstanta  
b<sub>1</sub>b<sub>2</sub>b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi  
e = Faktor kesalahan

### 3.5.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

Setiap masalah penulisan diajukan dalam bentuk kalimat pertanyaan, hipotesis berfungsi sebagai solusi sementara. Dikatakan sementara karena hanya diberikan jawaban menurut teori yang relevan sedangkan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung fakta-fakta empiris yang dibuat belum dilakukan (Ghozali I, 2011).

#### a. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F mengukur pengaruh simultan faktor independen dan dependen terhadap variabel dependen. Dalam penyelidikan dengan dua atau lebih variabel independen, uji F diterapkan. Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif diterima yaitu pengaruh bebas terhadap terikat signifikan. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka hipotesis alternatif pengaruh bebas terhadap terikat tidak signifikan.

#### b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t berusaha untuk menetapkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi dependen. Studi dengan satu atau lebih variabel independen sering menggunakan uji t. Hipotesis statistik untuk pengujian parsial dapat dinyatakan sebagai berikut sesuai dengan hipotesis penulisan:

- Jika  $Sig > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Jika  $Sig < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3.5.6 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menurut Sugiyono (2016) adalah angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi yang sesuai pada variabel independen.

Jadi koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya presentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi berupa presentase, yang menunjukkan presentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi (Ghozali, 2021).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, F. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*.
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). *Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 2, 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Ghozali I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. BP Universitas Diponegoro.
- Gwijangge, N., Jati, I. K., Asri Dwija Putri, I. G. A. M., & Wirawati, N. G. P. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1549. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p16>
- Indeks Membangun Desa Kabupaten Kendal. (2022). Indeks Membangun Desa (IMD) Kecamatan Gemuh 2022. <https://data.kendalkab.go.id/am/dataset/indeks-desa-membangun-idm-menurut-desadi-kecamatan-gemuh-kabupaten-kendal-tahun-2022/resource/acba882b-1321-48be-8408-efea18ac98ad>
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2023). Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1). <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827>
- Ismail, M., Kuncara Widagdo, A., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/336/pdf>
- Ningsih, W., & Kartadjumena, E. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/1384/1086>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- PP Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Purnama, F., & Nardirsyah, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerinah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *I(2)*, 1-15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id.EKA/article/view/743>
- Sari, A. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)*. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/download/218/37/786>
- Suci, R., Rohman, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41645>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT.Alfabet.
- Syamsul Rijal, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Handajani, L., & Putra Buana Sakti, D. (2021). *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wonar, K. F. S. P. B. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Ketaat*. <https://www.academia.edu/download/78486606/8.pdf>
- Wulandari, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen*.
- Zeyn, E. (2011). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan (Vol. 10, Issue 1)*.

